

Pengembangan Daya Tarik Wisata Bukit Makmur di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara

Dela Brigitha Febriana¹, Sri Indarti²

¹²Universitas Muhammadiyah Bengkulu

dela.bf@gmail.com
sri.indarti@umb.ac.id

Abstract

There are tours in Bukit Makmur village, Pinang Raya District. Bukit Makmur tourist attraction is one of the tourist destinations that is quite interesting to visit. The purpose of this study is to analyze the development of Bukit Makmur tourist attractions in Bukit Makmur Village, Pinang Raya District, North Bengkulu Regency. The result of this study is that physical alignment is carried out in an effort to handle physical infrastructure first. Local infrastructure that has started/has been damaged, garbage, several roads to attractions that have not been marked (direction), accommodation facilities that are available but with conditions that are starting to decline, violations of building or environmental planning and service management. The arrangement is carried out by utilizing what already exists (has been built), but is not yet or less functional. Arrange the presence of traders in the Bukit Sari tourist attraction area so that it looks neat by preparing a special location for selling. The development is carried out while reading the development of tourism and the problems (issues) that develop in the next few years, while continuing to control and arrange. The development of Bukit Sari Tourism has actually been carried out since last year, but the realization will be carried out in the middle of the year in Bukit Makmur. The reason why Bukit Sari Tourism needs to be developed is because the park has good potential as a tourist attraction. The location of the park will be used as a place for annual events.

Keywords: Development; Tourist Attractions; Structuring; Physical Alignment;

Abstrak

Terdapat wisata di desa Bukit Makmur, Kecamatan Pinang Raya. Objek wisata Bukit Makmur merupakan salah satu destinasi wisata yang cukup menarik untuk dikunjungi. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengembangan objek wisata Bukit Makmur di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara. Hasil dari penelitian ini adalah penataan fisik dilakukan dengan upaya penanganan prasarana fisik terlebih dahulu. Prasarana setempat yang sudah mulai/sudah rusak, sampah, beberapa jalan menuju objek wisata yang belum diberi marka (penunjuk arah), sarana akomodasi yang tersedia tetapi dengan kondisi yang mulai menurun, pelanggaran tata bangunan atau lingkungan dan pengelolaan pelayanan. Penataan dilakukan dengan memanfaatkan yang sudah ada (sudah dibangun), tetapi belum atau kurang berfungsi. Penataan keberadaan pedagang di kawasan objek wisata Bukit Sari agar tampak rapi dengan menyiapkan lokasi khusus untuk berjualan. Pengembangan dilakukan dengan tetap membaca perkembangan pariwisata dan permasalahan (isu) yang berkembang dalam beberapa tahun ke depan, dengan tetap melakukan pengendalian dan penataan. Pengembangan Wisata Bukit Sari sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun lalu, namun realisasinya akan dilakukan pada pertengahan tahun di Bukit Makmur. Alasan mengapa Wisata Bukit Sari perlu dikembangkan adalah karena taman tersebut memiliki potensi yang baik sebagai objek wisata. Lokasi taman tersebut akan dijadikan tempat penyelenggaraan acara tahunan.

Kata Kunci: Pengembangan, Objek Wisata, Penataan, Penataan Fisik;

Cite this article format:

Febriana, D. B., Indarti, S. (2024). Pengembangan Daya Tarik Wisata Bukit Makmur di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara. PETAHANA: Journal of Social Politics and Public Administration, 1(2), 168-176.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki tempat-tempat menarik untuk pariwisata wilayah pedalaman yang indah, reruntuhan budaya dan sejarah yang menarik, pantai-pantai, kehidupan malam (Jakarta dan Bali). Namun, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada September 2019 sebanyak 1,4 juta kunjungan turun dari 1,56 juta kunjungan pada bulan sebelumnya. Sementara sepanjang tahun ini hingga September jumlahnya mencapai 12,27 juta kunjungan, naik 2,63% dibanding periode yang sama tahun lalu. Padahal, Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan pariwisata tertinggi nomor sembilan di dunia. Indonesia sebagai negara dengan ribuan pulau beraneka keindahan alamnya dan penduduknya terdiri dari ratusan suku bangsa memiliki potensi wisata alam, sosial, dan budaya yang besar (Labolo, 2021:233).

Potensi dan sumber daya alam yang ada harus dimanfaatkan dan dikembangkan menjadi objek wisata yang menarik. Daya tarik utama wisatawan yang berkunjung ke Indonesia adalah karena keindahan alam dan kekayaan seni budaya, potensi ini sangat menarik untuk dikembangkan. Pengembangan pariwisata di Indonesia bukan hanya sekedar untuk meningkatkan perolehan devisa saja, tetapi pariwisata diharapkan dapat berfungsi sebagai katalisator pembangunan (Agent of Development).

Pariwisata apabila dikembangkan secara baik dan terencana, dapat mempercepat proses pembangunan. Secara makro, pariwisata dapat meningkatkan kesempatan berusaha, kesempatan kerja, penerimaan pajak, retribusi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Nasional dan sekaligus akan memperkuat posisi Neraca Pembayaran. Indonesia merupakan Negara Tujuan Wisata (Tourist Destination Country), hal ini berarti akan semakin dituntut kesiapan SDM pariwisata yang kompeten dan profesional untuk mengantisipasi pertumbuhan pariwisata yang lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi (Ristiana, 2016 : 29). Salah satu wilayah yang memiliki aneka ragam sumber daya baik alam maupun budaya yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah Provinsi Bengkulu. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor andalan Provinsi Bengkulu. Daerah ini memiliki objek wisata yang beragam, baik wisata alam, budaya, maupun sejarah. Oleh karena itu, provinsi Bengkulu memiliki objek wisata yang berpotensi untuk dikembangkan.

Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Bengkulu.

Untuk menata kembali potensi-potensi pariwisata dan komponen penunjangnya, agar pengembangan daya tarik wisata yang akan datang dapat lebih terarah dan sesuai dengan permintaan wisatawan maka harus disusun pedoman tersebut berupa Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah atau RIPPARDA. Pentingnya disusun RIPPARDA adalah untuk memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi kepariwisataan dari sisi produk, pasar, spasial, sumber

daya manusia, manajemen, dan sebagainya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat serta untuk mengatur peran setiap stakeholders terkait baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas daerah/wilayah agar dapat mendorong pengembangan pariwisata secara sinergis dan terpadu.

Pengembangan pariwisata daerah dapat menjadi perhatian yang strategis dalam menunjang pembangunan suatu daerah. Pengembangan pariwisata dilakukan bukan hanya untuk kepentingan wisatawan mancanegara saja, namun juga untuk menggalakkan kepentingan wisatawan dalam negeri. Melalui pengembangan tersebut diharapkan sektor pariwisata mampu menjadi motor penggerak bagi perekonomian suatu daerah, karena proses dan output sektor lain seperti pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, perindustrian dan lainnya dapat dijual sebagai obyek kunjungan. Pemerintah dituntut untuk lebih kreatif, produktif serta inovatif dalam melakukan kebijakan mengelola dan mengembangkan potensi-potensi pariwisata yang ada. Pengembangan pariwisata tidak terlepas dari unsur fisik maupun non fisik, sehingga perlu diperhatikan peran dari unsur-unsur tersebut.

Kabupaten Bengkulu Utara merupakan salah satu daerah pariwisata yang mempunyai potensi yang tinggi untuk mendorong pertumbuhan-pertumbuhan sektor prioritas dan unggulan dalam pembangunan perekonomian di Bengkulu Utara diikuti dengan pembangunan sektor lain yang berwawasan pariwisata dan diarahkan pada pengembangan sarana penunjang dan pendukung kepariwisataan dari seluruh sektor terkait di berbagai daerah-daerah Kabupaten Bengkulu Utara seperti kecamatan, kelurahan dan desa-desa. (Rosvita Flaviana, 2019 : 91).

Kabupaten Bengkulu Utara sebagai salah satu kabupaten yang secara administratif termasuk dalam wilayah Provinsi Bengkulu, memiliki berbagai kekayaan sumber daya alam dan berbagai potensi yang sangat potensial untuk dikembangkan. Salah satunya Wisata Bukit Makmur merupakan destinasi wisata yang tak kalah menarik dari tempat wisata lainnya yang ada di Bengkulu Utara. Pesona wisata bukit makmur menarik perhatian pengunjung dengan keindahan alam yang ada disekelilingnya. Wisata Bukit Makmur merupakan tempat wisata yang baru dibuka kembali sejak tahun baru 2021 setelah tutup selama 1 tahun karena pandemi Covid-19. Wisata ini dikelola oleh seluruh masyarakat sebanyak 30 RT yang ikut serta dan berpartisipasi dalam mengelola tempat wisata bukit makmur. Semua masyarakat terlibat dimulai dari penanaman bunga, mengelola fasilitas, kuliner UMKM, dan petugas parkir (Ilham, 2020 : 39).

Terdapat wisata yang ada di desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya. Objek Wisata Bukit Makmur merupakan salah satu destinasi wisata yang cukup menarik untuk dikunjungi. Obyek wisata ini terletak di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Obyek wisata ini dikelola oleh BUMDes. Obyek wisata ini menyediakan berbagai sarana wisata seperti kolam renang, kolam pemancingan, perahu speedboat, flying fox dan banyak titik menarik dan indah untuk dijadikan tempat selfy. Pemerintah desa Bukit Makmur mulai membangun obyek wisata ini pada tahun 2016 melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Selain itu, juga terdapat wisata Biru Muda Group (BMG) yang lokasinya juga terdapat di Desa Bukit Makmur yang juga menyuguhkan keindahan alamnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Bengkulu Tengah yang beralamat di jalan Renah Lebar, Kec. Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan Kode Pos 38382. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang merupakan suatu prosedur untuk memecahkan masalah dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan sekitar objek penelitian berdasarkan fakta-fakta pada saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu tujuan mendasar yang ingin dicapai negara berkembang seperti Indonesia saat ini adalah tercapainya suatu pertumbuhan ekonomi yang kuat dan mantap. Usaha kepariwisataan merupakan salah satu sektor pembangunan yang secara terus menerus diupayakan pengembangannya agar dapat didayagunakan sebagai salah satu andalan kegiatan perekonomian nasional dan daerah. Penerimaan devisa dan pendapatan daerah dari sektor pariwisata masih belum memenuhi target yang diharapkan, sehingga peran serta pemerintah, dunia usaha dan masyarakat masih harus terus di tuntut peran aktifnya. Berkembangnya kegiatan pariwisata di suatu daerah akan memberikan pengaruh dan mendorong pembangunan sektor-sektor lain khususnya dalam hal menembus lapangan pekerjaan dan peluang untuk usaha.

Komunikasi merupakan faktor penting berjalannya organisasi/lembaga termasuk sosialisasi visi misi, strategi dan operasional Dinas Pariwisata Kepemudaan dan olahraga Kabupaten Bengkulu Utara. Komunikasi sebagai penghubungantara pemangku kebijakan dan pelaksana kebijakan baik itu antarlembaga pemerintah dengan lembaga lain seperti dunia usaha pariwisata atau masyarakat, demikian juga untuk menjalin interaksi personal antar pelaku-pelaku pariwisata dalammenyatakan keinginan dan rencana pelaksanaan program pariwisata. Termasuk untuk memaksimalkan implementasi potensi pariwisata sebagai penggerak pemerataan dan peningkatan pembangunan. Pemerintah kabupaten Bengkulu Utara kurang melakukan sosialisasi dan edukasi dalam mengimplementasikan kebijakan pariwisata.

Sosialisasi implementasi kebijakan mengindikasikan perlunya perintah pelaksanaan dan metode kerja yang dapat diterima dan dipahami dengan jelas (clarity) dan konsisten (consistency). Hal ini berdampak terhadap implementasi kebijakan berjalan kurang maksimal. Komunikasi juga memegang peranan penting untuk meraih prospek dan peluang di bidang ekonomi berbasis pariwisata karena itu pemerintah Bengkulu Utara melalui Dinas terkait diharapkan dapat memfasilitasi pelatihan-pelatihan industri kecil atau usaha kecil masyarakat, membantu membuka peluang pasar baik melalui penataan pasar rakyat, maupun pasar ekspor hasil usaha masyarakat atau hasil industri pariwisata keluar daerah yang pasti akan berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Bengkulu Utara.

Sifat komunikasi pemerintah sebaiknya integratif artinya baik pemerintah sebagai komunikator maupun masyarakat penerima informasi dan penerima pemberdayaan berada pada posisi yang sama sehingga tujuan yang diharapkandapat tercapai dengan baik; terbukanya kesempatan

mengembangkan ide dan pemikiran yang dapat dipertukarkan dalam proses pelatihan dan edukasi melalui diskusi dan dialog agar setiap individu dapat menerima ide, gagasan dan materi pemberdayaan secara efektif. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama (inconsistent) terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan (conflicting), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif. (Van Meter dan Van Horn dalam Agustino, 2006:162).

Berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di kabupaten Bengkulu Utara, Pemerintah kurang melakukan komunikasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait rencana kebijakan pariwisata, sehingga kordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan pariwisata kurang dipahami oleh pemangku kebijakan yang lain. Sehingga berdampak terhadap program kurang berjalan sebagaimana yang ditargetkan. Selain itu dukungan berupa komitmen semuapihak tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan karena penyaluran (transmission) komunikasi kepada pemangku kebijakan (orang-orang yang tepat) sebagai pelaksana/implementor tidak terlaksana dengan baik (tidak terkoneksi).

Sumber daya adalah perangkat mutlak dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Bengkulu Utara membutuhkan sumber daya yang mencukupi dan memadai baik dari segi kualitas dan kuantitasnya yang terkait dengan ketrampilan, dedikasi, profesionalitas dan kompetensi dibidang pariwisata. Namun masalah utamanya sering terletak pada perhatian dan komitmen (dedikasi dan profesionalitas) sumber daya manusia yang terlibat.

Implementasi yang maksimal atau efektif dan efisien mengindikasikan perlunya sumber daya yang cukup memadai. Kurangnya perhatian dan komitmen pegawai dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan pariwisata mengindikasikan terbatasnya sumber daya baik SDM maupun sumber dana. Komitmen, loyalitas dan profesionalisme pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta instansi lain perlu ditingkatkan agar mampu mengimplementasikan kebijakan pariwisata sebagai kekuatan pendorong pembangunan yang lain karena sumber daya yang lain seperti anggaran, fasilitas dan yang lainnya hanya merupakan penunjang sekalipun juga penting, namun yang terpenting adalah sumber daya manusia itu sendiri.

Terdapat kecenderungan dimana ada banyak pegawai lebihnyaman duduk-duduk saja ketika hari-hari kerja, kurang inisiatif yang muncul dari mereka kecuali pada saat mendapat instruksi dari pimpinan untuk melaksanakan kegiatan. Serta minimnya Perhatian dan komitmen pegawai terhadap tugas dan tanggung jawabnya yang merupakan indikator yang berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada lingkungan Dinas. Selain itu kurangnya pembekalan melalui program orientasi dan pelatihan tentang peran dan tanggung jawab yang diberikan kepada pegawai berkaitan dengan pengembangan pariwisata.

Selain itu sering kali ketika ada instruksi kepada pegawai mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pariwisata, pegawai kurang memahami sehingga tidak dapat dilakukan dengan baik. Ini

semakin bertambah rumit dengan kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh pegawai, tidak hanya itu bahkan komitmen dari pegawai dalam pelaksanaan Renstra pun sangat rendah. Apabila SDM dilatih dan menguasai pekerjaannya, mereka akan mampu berkontribusi positif dalam merealisasi tanggung jawab dan mengembangkan tugas dan kewajiban yang akan mendukung kelancaran pelaksanaan dan pencapaian tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara.

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. (Van Meter dan Van Horn dalam Agustino, 2006:162).

Sumber Daya dalam Implementasi Pengembangan pariwisata di Kabupaten Bengkulu Utara dapat dikatakan belum optimal, hal ini dikarenakan masih minimnya pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi terkait berkaitan dengan pariwisata untuk meningkatkan profesionalisme pegawai pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara.

Proses disposisi dalam implementasi kebijakan yang dituangkan dalam bentuk program kerja, diawali dengan penyusunan program berdasarkan keadaan riil mengenai bidang pariwisata. Penyampaian ide-ide strategis menjadi simbol berlangsungnya disposisi dari dan kearah pelaksanaan yang diikuti dengan pemahaman lingkungan dan potensi yang dimiliki. Setiap implementor perlu mengkoordinasikan penjabaran program hingga tahap evaluasi karena itu implementor memerlukan kewenangan, informasi timbal balik melalui komunikasi dan koordinasi yang baik dan transparan dan terus menerus antara bidang-bidang atau satuan-satuan agar dapat memberikan diagnosa masalah –masalah dan usulan solusi.

Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Utara sebagai ujung tombak sektor kurang memperhatikan penerimaan disposisi atau instruksi dari atasan, dan pegawai kurang memahami apa yang hendak dilakukan atau yang dimaksudkan, maka dapat dipastikan bahwa implementasi kebijakan pariwisata tidak akan berhasil masalah ini yang tergambar dalam hubungan-hubungan yang terjalin diantara perumus kebijakan pariwisata dan pelaksana kebijakan di Kabupaten Bengkulu Utara. Disposisi implementasi kebijakan diawali penyaringan (befiltered) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (implementors) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan.

Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (cognition), pemahaman dan pendalaman (comprehension and understanding) terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (acceptance, neutrality, and rejection), dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan. (Van Meter dan Van Horn dalam Agustino, 2006:163). Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bengkulu Utara.

Pemerintah belum menindaklanjuti rencana pengembangan pariwisata (grand design) yang telah disusun dan masyarakat belum menggantungkan mata pencahariannya kepada sektor pariwisata, minimnya rasa memiliki dan usaha untuk menciptakan kreatifitas, minimnya koordinasi dengan para pemangku adat dan budaya, serta masyarakat dan pemilik wisata.

Struktur organisasi mengatur tata aliran pekerjaan agar masing-masing memiliki tugas serta tidak lagi mencampuri tugas-tugas yang lain, dalam implementasi kebijakan disebut standar operation prosedur (SOP), yang menjadi pedoman bagi implementor untuk bertindak. Dalam lingkungan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Utara, garis perintah tampak di dalam struktur organisasi yang memberikan gambaran bahwa Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Utara menetapkan kebijakan yang kemudian dijalankan oleh bidang-bidang di bawahnya. Secara lebih spesifik dibagi menjadi lima bidang yang memiliki tupoksi yang berbeda dan harus bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Dinas. Kelima bidang tersebut kemudian membawahi sub bagian dan seksi yang selanjutnya membawahi staf yang bekerja berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta bertanggung jawab kepada kepala bidang tersebut.

Hal ini menggambarkan bahwa ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Selama ini pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara kurang menjabarkan tupoksi dan struktur birokrasi antar instansi atau antar lembaga secara integral sehingga mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan yang cenderung egosektoral. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk menjabarkan hubungan dan koordinasi antar instansi mengindikasikan perlunya SOP yang integral dan holistik untuk dijadikan sebagai pedoman dan acuan setiap instansi menjabarkan tupoksi yang dimilikiberkaitan dengan upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Bengkulu Utara. Sebagaimana Smith (Quade, 1977:261), menjelaskan istilah "Implementing Organization" maksudnya birokrasi pemerintah yang mempunyai tanggungjawab dalam melaksanakan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Senada dengan itu Tachjan (2006:27), menjelaskan birokrasi ini memegang peran dominan dalam implementasi program dan kebijakan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa peran pemerintah sangat penting dalam melaksanakan suatu kebijakan karena pemerintah memiliki akses untuk melakukan komunikasi dengan seluruh elemen yang berkaitan dengan kebijakan yang akan di laksanakan

Struktur birokrasi belum terkoordinasi dengan baik dalam menjalankan tugas untuk menopang pengembangan pariwisata di Kabupaten Bengkulu Utara, baik itu secara internal maupun eksternal Dinas kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Bengkulu Utara, karena untuk memperoleh hasil yang maksimal seharusnya interaksi dalam struktur birokrasi lebih terpola, baik dari dalam lingkungan internal maupun luar instansi. Tata aliran pekerjaan dan garis perintah harus lebih jelas sekalipun telah tampak tetapi struktur birokrasi sering tidak berdaya karena tidak memiliki manajemen kerja dan kurang mengetahui apa yang harus dikerjakan seperti itu pula yang terjadi dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Bengkulu Utara.

Melihat secara keseluruhan uraian yang ada, maka peneliti memberikan kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan pengembangan Pariwisata pada Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga

kabupaten Bengkulu Utara belum optimal menerapkan empat variabel teori George Edward III dalam implementasi kebijakan pariwisata. Untuk itu perlu pembenahan dan pengembangan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melalui perbaikan fungsi, peningkatan produktivitas dan efisiensi yang akan berimplikasi terhadap keputusan mengadakan perubahan secara kultur, sistem penugasan, dan penyesuaian program dan anggaran serta penerapan sistem teknologi komunikasi dan pemakaian sumber daya manusia yang tepat.

KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengembangan objek wisata bukit makmur di Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara, peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Penyelarasan fisik dilakukan dengan upaya untuk menangani terlebih dahulu prasarana fisik. Prasarana setempat yang mulai/sudah rusak, sampah, beberapa jalan menuju daya tarik yang belum bertanda (arah), sarana akomodasi yang tersedia namun dengan kondisi yang mulai menurun, pelanggaran tata bangunan atau tata lingkungan serta tata pelayanan. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga saat ini sedang menyusun kerangka acuan kerja (KAK) kemudian membuat harga perkiraan sendiri (HPS) untuk kegiatan pembangunan menara pandang di Wisata Bukit makmur Bengkulu Utara. Setelah selesai membuat KAK dan HPS, selanjutnya Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga mengusulkan lelang paket kegiatan pembangunan menara pandang tersebut. Usulan disampaikan kepada pejabat pengadaan barang dan jasa pemerintah setempat
2. Penataan dilakukan dengan memanfaatkan apa yang sudah ada (sudah dibangun), namun belum atau kurang berfungsi. Maksud kegiatan penataan adalah untuk mengembangkan dan mengelola hasil pembangunan yang lalu atau meningkatkan kemanfaatan dan fungsi suatu area/kawasan untuk berbagai kepentingan masyarakat maupun wisatawan. Prinsipnya adalah sedikit mungkin melakukan pembongkaran, bila tidak menimbulkan ancaman atau dampak yang serius. Kegiatan penataan ini dapat pula mengandung unsur penertiban dan sebaliknya, hanya fokusnya yang berbeda. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, akan menata keberadaan pedagang di kawasan objek wisata Wisata Bukit makmur agar terlihat rapi dengan cara menyiapkan lokasi khusus untuk berjualan.
3. Pengembangan yang berarti meningkat lebih lanjut untuk menambah elemen baru, fungsi baru, cara atau strategi pemasaran yang baru, pengembangan jumlah sarana pariwisata/investasi baru, pengembangan jenis usaha baru, dan bahkan juga pengembangan regulasi baru. Pengembangan dilakukan sambil membaca perkembangan kepariwisataan dan permasalahan (issues) yang berkembang dalam beberapa tahun ke depan, seraya terus melakukan penertiban dan penataan. Pengembangan Wisata Bukit makmur sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun kemarin tapi realisasi yang akan banyak dilakukan pada pertengahan tahun Bukit Makmur. Adapun alasan mengapa Wisata Bukit makmur perlu dikembangkan karena Taman memiliki

potensi yang bagus sebagai tempat wisata. lokasi taman tersebut akan dijadikan tempat digelarnya even tahunan.

REFERENSI

- Apriyani. 2021. Analisis Potensi Pengembangan Obyek Wisata Danau Bebek Bebekan Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Labuhan Ratu. Skripsi. IAIN Metro Lampung.
- Barreto dan Giantari. 2015. Pengembangan Objek Wisata Panas di Desa Marobo, Kabupaten Bobonaro, Timor Leste. E-jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol. 4 No. 11
- Flaviana. 2019. Strategi Pengembangan Objek Wisata Kampung Tradisional. Kabupaten Ngada NTT. Jurnal Akademi Komunitas, Vol. 11, Nol 4
- Ilham. 2020. Buku Pintar Administrasi Publik. Penerbit : Gramedia.
- Indonesiani. 2019. Analisis Pengembangan Objek Wisata Tanjung Karang Di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala. Jurnal Katalogis, Vol. 3 No. 7
- Labolo. 2021. Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta : Kelapa Gading Permai.
- Moleong. 2021. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Bengkulu.
- Ristiana. 2016. Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kotabaru Tengah. Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintah Lokal, Vol. 1 Edisi 2
- Sugiyono, 2018. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta
- Suwontoro. 2021. Dasar-Dasar Pariwisata. Yogyakarta: Andi Offset.
- Yoeti. 2016. Pengantar Ilmu Pariwisata. Bandung : Angkasa.